

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan utama dalam pembangunan di Provinsi Jawa Timur, termasuk di Kawasan Gerbangkertasusila Plus. Kawasan ini terdiri dari Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Jombang, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban (Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, 2022). Kawasan Gerbangkertasusila Plus merupakan wilayah metropolitan yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, dimana Kota Surabaya berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi daerah-daerah sekitarnya.

Secara geografis wilayah yang berdekatan dengan Kota Surabaya yang merupakan pusat pertumbuhan adalah Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan. Seharusnya menurut teori *Growth Pole* yang dikemukakan oleh Perroux (1955) yang menyatakan bahwa, kutub pertumbuhan ekonomi tidak terjadi secara tidak merata di semua wilayah, melainkan bersifat terpusat pada beberapa titik atau kutub pertumbuhan (*growth poles*) yang memiliki potensi besar atau penggerak ekonomi. Dan proses pertumbuhan ini digunakan untuk mendorong perkembangan wilayah lain di sekitarnya. Namun meskipun secara geografis dekat dengan Surabaya, angka tingkat kemiskinan di Kabupaten Bangkalan masih tergolong tinggi dibandingkan dengan daerah lain di Gerbangkertasusila Plus yakni 18,66 persen pada tahun 2024 (tabel 1.1). Berikut

merupakan data kemiskinan di Kabupaten Bangkalan dan kabupaten/kota yang termasuk dalam Kawasan Gerbangkertasusila Plus:

Tabel 1.1 Persentase Penduduk Miskin Tahun 2013-2024 (Persen)

Thn.	Kab. Gresik	Kab. Bangkalan	Kab. Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Surabaya	Kab. Sidoarjo	Kab. Lamongan	Kab. Jombang	Kab. Bojonegoro	Kab. Tuban
2013	13,94	23,23	10,99	6,65	6,00	6,72	16,18	11,17	16,02	17,23
2014	13,41	22,38	10,56	6,42	5,79	6,40	15,68	10,80	15,48	16,64
2015	13,63	22,57	10,57	6,16	5,82	6,44	15,38	10,79	15,71	17,08
2016	13,19	21,41	10,61	5,73	5,63	6,39	14,89	10,70	14,60	17,14
2017	12,80	21,32	10,19	5,73	5,39	6,23	14,42	10,48	14,34	16,87
2018	11,89	19,59	10,08	5,50	4,88	5,69	13,80	9,56	13,16	15,31
2019	11,35	18,90	9,75	5,15	4,51	5,32	13,21	9,22	12,38	14,58
2020	12,40	20,56	10,57	6,24	5,02	5,59	13,85	9,94	12,87	15,91
2021	12,42	21,57	10,62	8,37	5,23	5,93	13,86	10,00	13,27	16,31
2022	11,06	19,44	9,71	7,88	4,72	5,36	12,53	9,04	12,21	15,02
2023	10,96	19,35	9,80	7,65	4,65	5,00	12,42	9,15	12,18	14,91
2024	10,32	18,66	9,37	5,57	3,96	4,53	12,16	8,60	11,69	14,36

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2025

Berdasarkan tabel 1.1 data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (2025), persentase penduduk miskin di kabupaten/kota yang tergabung dalam kawasan Gerbangkertasusila Plus mengalami tren penurunan dari tahun 2013 hingga 2019, akan tetapi mengalami peningkatan pada tahun 2020-2021 akibat dampak pandemi COVID-19. Setelah pandemi mereda, angka kemiskinan kembali menunjukkan tren penurunan pada tahun 2022 dan 2024, meskipun di beberapa daerah masih relatif tinggi.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain dalam kawasan Gerbangkertasusila Plus, Kabupaten Bangkalan memiliki persentase penduduk miskin paling tinggi (tabel 1.1). Hal ini tentunya akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dari ketiga kabupaten yang berdekatan dengan lokasi pusat pertumbuhan jika dilihat dari geografis, Kabupaten Bangkalan memiliki pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang paling rendah yakni pertumbuhan ekonomi

sebesar 1,94 persen (tabel 1.2) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 67,33 persen (tabel 1.3). Hal ini bertentangan dengan teori *Tobler's First Law of Geography* yang menyatakan bahwa “segala sesuatu berkaitan satu sama lain, namun sesuatu yang dekat memiliki keterkaitan yang lebih erat dibandingkan yang jauh” (Zheng *et al.*, 2023). Berikut data pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangkalan dan kabupaten/kota lain yang termasuk dalam kawasan Gerbangkertasusila Plus:

Tabel 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2013-2024 (persen)

Thn.	Kab. Gresik	Kab. Bangkalan	Kab. Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Surabaya	Kab. Sidoarjo	Kab. Lamongan	Kab. Jombang	Kab. Bojonegoro	Kab. Tuban
2013	6,05	0,19	6,56	6,20	7,58	6,89	6,93	5,93	2,37	5,85
2014	7,04	7,19	6,45	5,83	6,96	6,44	6,30	5,42	2,29	5,47
2015	6,61	-2,66	5,65	5,74	5,97	5,24	5,77	5,36	17,42	4,89
2016	5,49	0,66	5,49	5,77	6,00	5,51	5,86	5,40	21,95	4,90
2017	5,83	3,53	5,73	6,65	6,13	5,80	5,50	5,36	10,25	4,98
2018	5,81	4,22	5,88	5,80	6,19	6,01	5,44	5,29	10,25	5,15
2019	5,42	1,03	5,81	5,65	6,09	5,99	5,43	5,06	6,34	5,14
2020	-3,68	-5,59	-1,11	-3,69	-4,85	-3,69	-2,65	-1,98	-0,40	-5,85
2021	3,79	-2,07	4,12	3,65	4,29	4,21	3,43	3,24	-5,54	3,00
2022	7,38	-1,12	5,82	5,56	6,51	7,53	5,56	5,37	-6,16	8,88
2023	4,62	1,20	5,15	2,79	5,70	6,16	4,28	5,04	2,47	4,36
2024	4,79	1,94	5,29	5,32	5,76	5,54	4,81	5,15	1,67	3,86

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2025

Berdasarkan tabel 1.2, data berdasarkan Badan Pusat Statistik Jawa Timur persentase pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangkalan menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam selama periode tahun 2013 hingga tahun 2024. Pada tahun 2014, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan mencapai angka tertinggi yaitu 7,19 persen, namun pada tahun berikutnya justru mengalami kontraksi sebesar -2,66 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Bangkalan tidak stabil dan rentan terhadap perubahan.

Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan mengalami kontraksi paling besar yaitu -5,59 persen akibat dampak pandemi Covid-19, lebih rendah dibandingkan kabupaten/kota lain di Gerbangkertasusila Plus. Meskipun

pada tahun 2021 dan 2022 perekonomian mulai membaik, namun masih mencatatkan angka pertumbuhan negatif masing-masing sebesar -2,07 persen dan -1,12 persen. Memasuki tahun 2023 dan 2024, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan kembali positif, masing-masing sebesar 1,20 persen dan 1,94 persen. Akan tetapi, angka tersebut masih tergolong rendah dibandingkan kabupaten lain, seperti Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya, yang pertumbuhan ekonominya relatif lebih tinggi dan stabil.

Meskipun secara geografis dekat dengan pusat pertumbuhan, Kabupaten Bangkalan juga memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang paling rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Gerbangkertasusila Plus. Padahal seharusnya wilayah yang berdekatan dengan pusat pertumbuhan akan mendapatkan *impact* yang lebih besar. Hal ini bertentangan dengan teori pembangunan manusia menurut Amartya Sen (1999), yang menyatakan bahwa pembangunan bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang perluasan kebebasan manusia untuk hidup sehat, berpendidikan, dan memiliki penghidupan yang layak. Berikut merupakan data indeks pembangunan manusia di Kabupaten Bangkalan dan kabupaten lain yang termasuk dalam kawasan Gerbangkertasusila Plus:

Tabel 1.3 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2013-2023 (persen)

Thn.	Kab. Gresik	Kab. Bgkln	Kab. Mjk	Kota. Mjk	Kota. Sby	Kab. Sda	Kab. Lmgn	Kab. Jbg	Kab. Bjn	Kab. Tbn
2013	72,47	60,19	69,84	74,91	78,51	76,39	68,90	68,63	64,85	64,14
2014	72,84	60,71	70,22	75,04	78,87	76,78	69,42	69,07	65,27	64,58
2015	73,57	61,49	70,85	75,54	79,47	77,43	69,84	69,59	66,17	65,52
2016	74,46	62,06	71,38	76,38	80,38	78,17	70,34	70,03	66,73	66,19
2017	74,84	62,30	72,36	76,77	81,07	78,70	71,11	70,88	67,28	66,77
2018	75,28	62,87	72,64	77,14	81,74	79,50	71,97	71,86	67,85	67,43
2019	76,10	63,79	73,53	77,96	82,22	80,05	72,57	72,85	68,75	68,37
2020	76,11	64,11	73,83	78,04	82,23	80,29	72,58	73,63	70,18	69,60
2021	76,50	64,36	74,15	78,43	82,31	80,65	73,12	74,10	70,70	70,10
2022	77,16	65,05	74,89	79,32	82,74	81,02	74,02	74,66	71,15	70,79
2023	77,98	65,75	75,53	80,07	83,45	81,55	74,53	75,16	71,80	71,40
2024	82,67	67,33	76,69	81,76	84,69	82,67	75,90	75,67	72,75	72,31

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2025

Berdasarkan tabel 1.3, data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Bangkalan menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya, dari 60,19 persen pada tahun 2013 menjadi 67,33 persen pada tahun 2024. Meskipun angka ini terus mengalami kenaikan, peningkatan IPM di Kabupaten Bangkalan belum mampu menekan tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan IPM di Kabupaten Bangkalan belum cukup kuat untuk menopang pengurangan kemiskinan, yang kemungkinan disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta lapangan pekerjaan yang layak.

Jika dibandingkan dengan daerah lain di Gerbangkertasusila Plus, Kabupaten Bangkalan masih memiliki IPM yang paling rendah. Kota Surabaya memiliki IPM tertinggi, meningkat dari 78,51 persen pada tahun 2013 menjadi 84,69 pada tahun 2024, mencerminkan kualitas hidup yang jauh lebih baik dibandingkan kabupaten lain di sekitarnya. Kabupaten Gresik dan Kabupaten Mojokerto juga mengalami peningkatan IPM yang lebih cepat dibandingkan Kabupaten Bangkalan, dengan masing-masing mencapai 82,67 persen dan 76,69

persen pada tahun 2024, menunjukkan bahwa wilayah dengan sektor industri yang lebih maju cenderung memiliki pembangunan manusia yang lebih baik.

Sementara itu, Kabupaten Bojonegoro dan Tuban, yang sebelumnya memiliki IPM lebih rendah dari Bangkalan, kini mengalami peningkatan yang lebih pesat. Kabupaten Bojonegoro naik dari 64,85 persen pada tahun 2013 menjadi 72,75 persen pada tahun 2024, dan Tuban dari 64,14 persen menjadi 72,31 persen dalam periode yang sama, menunjukkan bahwa daerah-daerah ini berhasil mengoptimalkan pertumbuhan IPM untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Secara keseluruhan, meskipun IPM di Kabupaten Bangkalan terus menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, kenaikan ini belum cukup efektif dalam menekan angka kemiskinan dan menunjukkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Bangkalan masih tertinggal dibandingkan dengan daerah lain di kawasan Gerbangkertasusila Plus.

Penelitian terdahulu juga menunjukkan hasil yang beragam terkait hubungan antara pertumbuhan ekonomi, IPM, dan kemiskinan. Penelitian oleh Ardian *et al.*, (2024) di Provinsi Jambi menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi dan IPM berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Namun, penelitian Erian dan Sari (2022) di Kabupaten Simalungan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan IPM berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan. Hasil yang berbeda ini menunjukkan bahwa pengaruh pertumbuhan ekonomi dan IPM terhadap kemiskinan masih perlu diteliti lebih lanjut, terutama dalam konteks Kabupaten Bangkalan yang berada di Kawasan Gerbangkertasusila Plus.

Padahal secara teori, daerah yang dekat dengan pusat pertumbuhan seperti Kota Surabaya harusnya bisa memberikan efek limpahan sehingga pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM seharusnya mampu menurunkan tingkat

kemiskinan. Namun, fenomena di Kabupaten Bangkalan menunjukkan ketidaksesuaian antara teori dan realitanya. Kondisi tersebut menunjukkan adanya gap penelitian mengenai keterkaitan spasial antarwilayah di kawasan Gerbangkertasusila Plus. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis **pengaruh pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan (Studi Kasus Di Kabupaten Bangkalan Dalam Konteks Gerbangkertasusila Plus)** dan diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang paling berpengaruh dalam mengurangi kemiskinan di Kabupaten Bangkalan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat hubungan ketergantungan spasial Kabupaten Bangkalan dengan Kabupaten/Kota di kawasan Gerbangkertasusila Plus?
2. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Bangkalan dengan mempertimbangkan keterkaitan spasial antarwilayah di kawasan Gerbangkertasusila Plus?
3. Apakah indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Bangkalan dengan mempertimbangkan keterkaitan spasial antar wilayah di kawasan Gerbangkertasusila Plus?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis adanya dependensi spasial Kabupaten Bangkalan dengan kabupaten/kota di Gerbangkertasusila Plus.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Bangkalan dengan mempertimbangkan keterkaitan spasial antar wilayah di kawasan Gerbangkertasusila Plus.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Bangkalan dengan mempertimbangkan keterkaitan spasial antar wilayah di kawasan Gerbangkertasusila Plus.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori ekonomi regional dan spasial, khususnya terkait hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia dan tingkat kemiskinan dalam konteks keterkaitan spasial antarwilayah. Hasil penelitian ini dapat memperkuat atau memperbaharui temuan empiris sebelumnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan Di Kabupaten Bangkalan dalam konteks Gerbangkertasusila Plus. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lain dalam melakukan kajian lebih lanjut mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di daerah tertinggal.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan dan wilayah-wilayah yang termasuk dalam

Gerbangkertasusila Plus dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mengurangi angka kemiskinan. Dengan memahami pengaruh bagaimana pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan, pemerintah dapat menyusun strategi yang lebih tepat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan keterkaitan antarwilayah.

b. Bagi Perencana Pembangunan Wilayah

Penelitian ini dapat membantu perencana wilayah dan kota untuk memahami pentingnya pendekatan spasial dalam menyusun program pembangunan yang inklusif dan terintegrasi antarwilayah.